

PROBLEMATIKA HISTORIOGRAFI NASIONAL INDONESIA

Ahmad Choirul Rofiq

Dosen STAIN Ponorogo

e-mail: rofiq8377@yahoo.co.id

***Abstract:** The significance of history for human life is shown by the use of history as a teacher of life in the future. Because of that historical significance, many communities and nations intensified the writing of history to show their identity and build character of their people. Indonesia also has national history writing, although there are historical problems caused by the political interests of the ruling government. Academic anxiety then appeared among historians that promote objectivity. After the collapse of the New Order regime, a strong desire raised to publish the latest national history (Indonesia dalam Arus Sejarah) in order to fill the shortage of Sejarah Nasional Indonesia. Nevertheless, a reading of Indonesia dalam Arus Sejarah shows that this book has not answered yet all of those historical problems, such as the role of Pattimura and Si Singamangaraja XII in the fight against colonialism, the role of Budi Utomo in the national revival, the role Sjafruddin Prawiranegara and Assaat in the struggle for Indonesian independence, as well as the Movement of 30 September 1965 (G-30-S / PKI). Therefore, Indonesian historians have a moral obligation to make recommendations to the government to review the policy of the government that has very weak historical bases to give historical enlightenment to Indonesian people. In spite of it, the writing of Indonesia dalam Arus Sejarah should be appreciated because the writers have included many themes that were previously not found in Sejarah Nasional Indonesia.*

Pendahuluan

Thomas Samuel Kuhn melontarkan gagasan mengenai *scientific revolution* (revolusi ilmu) yang ditandai oleh pergantian paradigma (*paradigm shifts*). Proses revolusi ilmu dimulai dari [1] pra-ilmu (*prescience*) ketika tidak memiliki paradigma sentral; [2] ilmu biasa (*normal science*) ketika ilmuwan mencoba mengembangkan paradigma sentral melalui pemecahan teka-teki (*puzzle solving*); [3] keganjilan (*anomalies*) ketika ilmuwan mengalami kegagalan untuk menyesuaikan paradigma; [4] kegentingan (*crisis*) ketika paradigma benar-benar pada puncak anomali; dan [5]

ilmu revolusioner (*revolutionary science*) ketika paradigma baru muncul.²⁴⁶ Apabila perspektif Kuhn dipergunakan untuk melihat perkembangan historiografi Indonesia, terutama sejak penerbitan *Sejarah Nasional Indonesia* oleh Balai Pustaka pada tahun 1975, maka posisi historiografi sejarah Indonesia berada pada tahapan krisis setelah muncul banyak keganjilan mengenai buku tersebut.

Buku SNI yang dikatakan sebagai buku standar sejarah Indonesia telah dianggap sebagai sumber otentik di tengah masyarakat Indonesia. Buku itu dijadikan sejarah *babon* yang menjadi rujukan bagi penulisan sejarah Indonesia sehingga para pengajar sejarah menerapkannya dalam pengajaran sejarah Indonesia. Kalangan sejarawan menemukan keganjilan informasi di dalamnya. Di antara mereka ialah Asvi Warman Adam,²⁴⁷ Bambang Purwanto,²⁴⁸ dan Ahmad Mansur Suryanegara,²⁴⁹ serta yang terakhir adalah Taufik Abdullah dan A.B. Lopian.²⁵⁰ Melalui kajian terhadap permasalahan historiografis tersebut, *revolutionary science* (informasi sejarah yang lebih faktual dan akurat mengenai sejarah nasional Indonesia) diharapkan dapat segera terwujud.

Penulisan Sejarah Nasional Indonesia

Awal perkembangan penulisan sejarah di Indonesia dimulai dengan adanya penulisan sejarah dalam bentuk naskah. Beberapa sebutan untuk naskah-naskah antara lain adalah babad, hikayat, kronik, dan tambo. Bentuk penulisan sejarah pada naskah-naskah tersebut termasuk dalam kategori historiografi tradisional. Sebutan historiografi tradisional dipergunakan untuk membedakannya dari historiografi modern. Historiografi modern sudah lebih dahulu berkembang di Barat. Ciri utama historiografi modern dan yang membedakannya dengan historiografi tradisional adalah penggunaan fakta. Historiografi tradisional kurang mementingkan kebenaran fakta, sedangkan historiografi modern sangat mementingkan fakta. Fakta sangat penting karena fakta dapat menjadi kenyataan sejarah. Kalau kita membicarakan cerita sejarah berdasarkan pada fakta yang benar, berarti kita telah

²⁴⁶ Thomas Samuel Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions* (Chicago: The University of Chicago Press, 1970), 44 dan www.en.wikipedia.org.

²⁴⁷ Ia menulis *Pelurusan Sejarah Indonesia* (Yogyakarta: TriDE, 2004).

²⁴⁸ Ia bersama Asvi menulis *Menggugat Historiografi Indonesia* (Yogyakarta: Ombak, 2005),

²⁴⁹ Ia menulis *Api Sejarah* (Bandung: Salamadani, 2009).

²⁵⁰ Keduanya menjadi editor buku *Indonesia dalam Arus Sejarah* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2012).

menceritakan suatu kenyataan sejarah yang benar. Salah satu ciri fakta itu benar adalah fakta yang diuraikan dalam sumber itu dapat diterima akal.

Banyak sekali naskah-naskah yang tersebar di seluruh nusantara yang fakta-faktanya tidak masuk akal. Hal itu disebabkan alam pikiran masyarakat waktu itu yang belum bersifat rasional dan obyektif. Uraian historiografi tradisional merupakan gambaran dari pikiran masyarakat yang religio-magis sehingga isi naskah-naskah lama sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur kepercayaan masyarakat setempat. Dalam masyarakat yang masih tradisional terdapat kepercayaan-kepercayaan yang memandang bahwa kehidupan manusia sangat ditentukan oleh kekuatan-kekuatan di luar manusia. Kekuatan-kekuatan itu berupa alam, para dewa, benda-benda yang dianggap sakral, dan lain-lain. Manusia tidak mampu mengubah dirinya. Kedudukan manusia adalah suatu perubahan lebih berperan sebagai obyek, bukan sebagai subyek atau penentu.

Di beberapa daerah di Indonesia terdapat cerita yang bersumber dari historiografi tradisional tentang asal usul daerah tersebut. Di dalam sumber-sumber tersebut, misalnya, diceritakan bahwa sebelum terbentuknya suatu tatanan kehidupan yang teratur dalam daerah tersebut, keadaannya kritis atau tidak menentu. Dalam keadaan demikian, maka sang dewa menurunkan utusannya untuk memperbaiki krisis. Utusan dewa tersebut kemudian menikah dengan wanita yang ada di daerah itu. Setelah turunnya utusan dewa, keadaan di daerah itu menjadi baik dan mulailah tersusun suatu pemerintahan atau kerajaan. Hasil perkawinan antara utusan dewa dengan wanita yang dinikahinya ini kemudian menjadi pewaris atau silsilah penguasa kerajaan. Dalam masyarakat di Sulawesi Selatan, contoh cerita tersebut merupakan mitos *Tomanurung*.

Berdasarkan contoh cerita historiografi tersebut terlihat bagaimana manusia tidak menjadi penentu dalam suatu cerita sejarah. Terbentuknya asal usul suatu daerah berdasarkan cerita historiografi tradisional, bukan ditentukan oleh manusia. Yang menjadi penentu adalah dewa. Ketika dewa menurunkan utusannya ke muka bumi, maka terbentuklah suatu tatanan masyarakat. Perkembangan historiografi seiring dengan perkembangan alam pikiran manusia. Begitu pula halnya dalam perkembangan historiografi di Indonesia. Historiografi di Indonesia seiring pula dengan

perkembangan sejarah Indonesia. Historiografi tradisional Indonesia sudah ada sebelum kedatangan penjajah.²⁵¹

Setelah bangsa Indonesia berhasil memerdekakan dirinya, menurut Sartono Kartodirdjo, terasa di kalangan cendekiawan suatu keperluan untuk menulis kembali sejarah Indonesia karena penulisan-penulisan sejarah yang diwariskan oleh sejarawan Belanda sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan masyarakat Indonesia. Sudut penglihatan yang tercermin dalam karya-karya mereka terutama memusatkan perhatian kepada peranan bangsanya, maka Neerlando-sentrisme semacam itu perlu diganti dengan Indonesia-sentrisme, yaitu pandangan dari sudut penglihatan yang berpusat pada Indonesia sendiri. Pemikiran sekitar pandangan baru ini telah dikemukakan oleh beberapa ahli pikir sebagai salah satu usaha untuk mengarahkan usaha pemikiran serta penulisan sejarah Indonesia yang lebih memadai.

Suatu titik terang dalam perkembangan studi sejarah di Indonesia adalah Seminar Sejarah Nasional kedua di Yogyakarta pada Agustus 1970 ketika sejumlah sejarawan generasi baru mengajukan tulisan mereka dalam jumlah yang cukup besar. Tulisan-tulisan sejarah tersebut mencakup periode prasejarah sampai dengan periode yang modern. Setelah bangsa Indonesia berhasil dalam dekolonisasi secara politik melalui proklamasi kemerdekaannya, proses dekolonisasi dilanjutkan dalam penulisan sejarah. Di dalam masa penjajahan, bangsa Indonesia terasing dari sejarahnya sendiri. Apa yang diajarkannya lebih merupakan sejarah dari negeri bangsa penjajah yang menonjolkan peranan tokoh-tokoh penjajah, sedangkan peranan bangsa Indonesia ada di latar belakang belaka. Pelukisan dari sudut penglihatan Barat jelas-jelas berat sebelah karena subyektivitas yang timbul dari kepentingan perdagangan khususnya dan penjajahan pada umumnya. Masalah dekolonisasi dalam penulisan sejarah tidak cukup dengan mengubah peranan pemberontak menjadi pahlawan. Tetapi perlu diungkapkan segala kekuatan sosial yang menciptakan masyarakat Indonesia serta memberikan arah perkembangannya. Untuk melengkapi gambaran serta menerangkan proses sejarah, perlu diuraikan berbagai faktor yang mendorong pertumbuhan bangsa Indonesia.

Penyusunan kembali sejarah Indonesia hendaknya memenuhi beberapa syarat yang dituntut oleh proses dekolonisasi tersebut. Sejarah Indonesia yang wajar ialah sejarah yang mengungkapkan

²⁵¹ Agus Mulyana dan Darmiasti, *Historiografi di Indonesia dari Magis-Religiuis hingga Strukturis* (Bandung: Refika Aditama, 2009), 1-2.

"sejarah dari dalam" dengan menempatkan bangsa Indonesia sebagai pemegang peranan pokok. Proses perkembangan masyarakat Indonesia hanya dapat diterangkan sejelas-jelasnya dengan menguraikan faktor atau kekuatan yang mempengaruhinya, baik ekonomis, sosial, politik, maupun kultural. Diperlukan adanya pengungkapan aktivitas dari berbagai golongan masyarakat, tidak hanya para bangsawan atau ksatria, tetapi juga dari kaum ulama dan petani, serta golongan-golongan lainnya. Untuk menyusun sejarah Indonesia sebagai suatu sintesa yang menggambarkan proses perkembangan ke arah kesatuan geopolitik, maka prinsip integrasi perlu digunakan untuk mengukur seberapa jauh integrasi itu dalam dalam masa-masa tertentu telah tercapai.

Penulisan sejarah nasional Indonesia berpangkal pada paham bahwa Indonesia dengan berbagai kelompok penduduknya dapat dipandang sebagai suatu kesatuan yang tumbuh bersama dengan perkembangan wilayah Indonesia sebagai daerah politik-geografis. Paham itu kemudian diperkuat dengan kemunculan gerakan nasional yang semakin memperkuat kesadaran nasional, yaitu kesadaran bahwa penduduk kepulauan Indonesia merupakan satu bangsa. Penulisan sejarah didasarkan pada beberapa asumsi tentang perkembangan masyarakat Indonesia dan sejarahnya. Asumsi pertama, proses integrasi memuat pengertian bahwa ada kelangsungan dari kesatuan-kesatuan masyarakat dan kebudayaan lokal sampai yang nasional sehingga sejarah lokal atau daerah perlu ditulis dalam hubungannya dengan peranannya dalam kesatuan besar. Asumsi kedua berkaitan dengan perubahan sosial dan kebudayaan yang merupakan proses kompleks. Lembaga-lembaga kebudayaan mendapat pengaruh dari proses perubahan yang bergerak dengan berbagai kekuatan dan mencakup bermacam-macam aspek kehidupan. Asumsi ketiga menunjuk pada kenyataan bahwa setiap kesatuan etnis serta kebudayaannya perlu dipahami menurut jasa-jasa atau sumbangan yang diberikan kepada sejarah Indonesia serta perlu dimengerti berdasarkan nilainya sendiri. Setiap kesatuan sejarah menghasilkan warisan untuk masa depan.²⁵²

Selain penulisan sejarah nasional, para sejarawan juga menggiatkan penulisan sejarah lokal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari sejarah nasional. Secara kategoris, sejarah lokal terdiri dari empat macam. *Pertama*, sejarah sebagai peristiwa yang melukiskan peristiwa-peristiwa tertentu

²⁵² Baca prakata Sartono Kartodirdjo, selaku editor umum, tahun 1974 pada edisi ke-1 dalam Marwati Djoned Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto (ed.), *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid I (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), xiii-xiv.

dari masa silam. *Kedua*, penelitian struktural yang lebih menekankan struktur daripada proses. *Ketiga*, penelitian yang membahas aspek-aspek tertentu mengenai sejarah lokal. *Keempat*, pembahasan sejarah lokal umum tentang daerah-daerah tertentu dari masa kuno hingga masa kini.²⁵³

Pembicaraan mengenai historiografi Indonesia tidak dapat dipisahkan dari penerbitan buku *Sejarah Nasional Indonesia* dan *Indonesia dalam Arus Sejarah*. Buku SNI didukung pemerintahan Soeharto, sedangkan buku IDAS disokong penuh oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono. Kedua buku itu mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah sehingga dijadikan rujukan di sekolah-sekolah. Buku SNI merupakan karya historiografis mengenai perkembangan bangsa Indonesia yang ditulis para sejarawan Indonesia setelah melalui proses panjang. Penyusunan buku sejarah Indonesia dimulai tahun 1938 di Padang oleh dua penulis yang tidak terkenal dengan karya mereka *Ringkasan Sejarah Indonesia*. Pada zaman Jepang muncul *Sejarah Indonesia* karya Sanusi Pane. Namun buku itu tidak bermutu ilmiah karena bahannya diambil dari karya N.J. Krom dan P.J. Veth. Pada tahun 1951 (1952) terbentuk komite penulis sejarah nasional, tetapi tidak ada hasilnya.²⁵⁴

Tahun 1957, atas bantuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Seminar Sejarah Nasional diselenggarakan bersama oleh Universitas Gadjah Mada dan Universitas Indonesia. Walaupun upaya itu juga gagal menghasilkan karya sejarah nasional, namun sebagian besar peserta seminar benar-benar mempunyai kesadaran bahwa penelitian dan penilaian kembali terhadap bahan-bahan kesejarahan harus diselenggarakan lebih dulu sebelum dilakukan penulisan sejarah Indonesia.²⁵⁵ Upaya lebih serius terwujud seusai Seminar Sejarah Nasional II di Yogyakarta tahun 1970. Pemerintah membentuk Panitia Penyusunan Buku Standar Sejarah Nasional (PBSN) yang dipimpin oleh Sartono Kartodirjo (Ketua Umum), Marwati Djoened Poesponegoro (Ketua I), dan Nugroho Notosusanto (Ketua II). Buku SNI itu dipakai sebagai buku pelajaran di perguruan tinggi sekaligus bahan acuan penulisan buku sejarah tingkat sekolah dasar sampai sekolah lanjutan tingkat

²⁵³ Taufik Abdullah et al., *Ilmu Sejarah dan Historiografi: Arah dan Perspektif* (Jakarta: Gramedia, 1985), 31-32.

²⁵⁴ Purwanto, *Menggugat*, 72-73.

²⁵⁵ Soedjatmoko dalam pendahuluan *Historiografi Indonesia: Sebuah Pengantar*, ed. Soedjatmoko et al., terj. Mien Djubhar (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), xiii. Judul asli buku ini adalah *An Introduction to Indonesian Historiography* (Cornell University 1965).

atas. Buku itu terdiri dari 6 jilid. Jilid I tentang zaman prasejarah, jilid II tentang zaman sejarah kuno, jilid III tentang zaman pertumbuhan dan perkembangan kerajaan-kerajaan Islam (1600-1800), jilid IV mengenai periode 1800-1900, jilid V tentang periode 1900-1942, dan jilid VI mengenai periode 1942-1965.

Setelah sekitar 4 tahun mengadakan penelitian, termasuk studi banding di Amerika Serikat (Universitas Berkeley) dan Belanda (Universitas Leiden), pada 1975 buku SNI terbit dan ternyata segera melahirkan kontroversi. Konflik sudah dimulai dalam lingkungan tim penyusunnya. Deliar Noer, anggota penulis jilid V, yang ditugasi menulis "Pergerakan Islam 1900-1945" dipanggil oleh Nugroho Notokusanto dan diminta mengundurkan diri. Materi sejarah yang ditulis Deliar tidak dimuat sama sekali dalam SNI. Mundurnya Deliar diikuti oleh seluruh temannya dalam jilid V, yakni Abdurrahman Surjomihardjo, Thee Kian Wie, dan Taufik Abdullah. Terakhir, Sartono Kartodirjo mundur dan menolak sebagai penanggung jawab materi SNI, terutama jilid VI.²⁵⁶

SNI jilid VI, dengan Nugroho Notokusanto sebagai ketua editor serta Saleh Djamhari, Ariwiadi, Rochmani Santoso, Emilia B. Musin Wismar, dan Moela Marbun sebagai anggota, banyak menuai kritik. Sebanyak 17 buku dan 14 artikel karya Nugroho sendiri dijadikan acuan jilid VI, kemudian menyusul 13 karya A.H. Nasution dan 11 karya Aidit. Sedangkan artikel dari penulis lain tidak melebihi tiga tulisan. Walaupun hal itu secara ilmiah tidak salah, tetapi mengesankan bahwa penulisnya lebih banyak menjabarkan pendapatnya sendiri daripada melakukan kajian sejarah secara utuh. Selain itu, kerangka acuannya tidak jelas dan kata-kata yang dipakai mirip laporan jurnalistik. Logika yang dipakai dalam menarik suatu kesimpulan sering tidak jelas.²⁵⁷

Setelah mengalami beberapa kali cetak ulang, bangsa Indonesia kemudian mempunyai buku sejarah nasional terbaru, yakni *Indonesia dalam Arus Sejarah*. Buku yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan PT Ichtiar Baru van Hoeve pada bulan Desember 2012 itu terdiri dari 9 jilid. Jilid I tentang periode prasejarah, jilid II tentang kerajaan Hindu-Buddha, jilid III tentang kedatangan dan peradaban Islam, jilid IV tentang kolonisasi dan perlawanan, jilid V tentang masa pergerakan kebangsaan, jilid VI tentang perang dan revolusi, jilid VII tentang periode pascarevolusi, jilid VIII tentang periode orde baru dan reformasi, serta jilid

²⁵⁶ Purwanto, *Menggugat*, 74-75.

²⁵⁷ *Ibid.*, 76-78.

IX memuat faktaneka dan indeks. Penyusunannya memerlukan waktu 10 tahun (2002-2012) dengan jumlah penulis hampir 100 orang terdiri atas sarjana-sarjana sejarah dan arkeologi bangsa Indonesia. Taufik Abdullah dan A.B. Lopian menjadi editor umum, sedangkan 15 pakar lainnya bertugas sebagai editor tiap jilid.

IDAS dilandasi oleh hasrat untuk menulis sejarah nasional yang baru setelah keruntuhan rezim orde baru. Meskipun demikian, menurut Taufik Abdullah, IDAS bukanlah revisi buku SNI karena ia merupakan karya tersendiri. SNI mungkin dipakai sebagai salah satu rujukan, tetapi bukan acuan utama. IDAS mendasarkan penulisan sejarah pada penelitian orisinal yang dilakukan oleh penulisnya masing-masing. Ia mempertimbangkan dan menyandarkan diri pada hasil penelitian dan penulisan sejarah mutakhir. Ia memperkenalkan sekian banyak peristiwa di daerah yang selama ini berada di luar “wilayah sejarah nasional”. Sebagaimana halnya karya kesejarahan lain, IDAS adalah suatu terminal, pemberhentian sementara, dalam usaha mendapatkan rekonstruksi masa lalu yang lebih lengkap dan utuh.²⁵⁸

Persoalan Historiografis dalam Sejarah Nasional Indonesia

Karena ditulis oleh banyak penulis, IDAS tampak seperti bunga rampai sejarah atau penerbitan bersama kalangan sejarawan yang pertanggungjawabannya diserahkan kepada masing-masing penulis. Pertanyaannya, apakah buku IDAS telah menjawab kegelisahan masyarakat terhadap buku SNI? Jika belum, langkah apakah yang seyogyanya dilakukan oleh sejarawan. Untuk mengetahuinya lebih lanjut, berikut ini diuraikan mengenai sebagian persoalan historiografis sejarah Indonesia.

1. Peranan Pattimura dan Si Singamangaraja XII dalam melawan penjajahan

Leirissa, dengan mengutip dari *Kapitan Pattimura* karya I.O. Nanulaitta (diterbitkan Depdikbud, 1979), mengatakan kesewenang-wenangan pemerintah Hindia Belanda di pulau Saparua, Maluku, mempunyai akibat jauh yang dinamakan perlawanan Pattimura. Berawal dari salah satu pertemuan rahasia, para pemuda mendaulat Thomas Matulesy sebagai pemimpin mereka (kapitan) dengan gelar Pattimura. Sebagai pimpinan perlawanan dari kalangan rakyat, Pattimura mampu mengikutsertakan pimpinan formal atau para raja di ‘negeri-negeri’ hingga pada 14 Mei

²⁵⁸Lihat pengantar Taufik Abdullah dalam buku *Indonesia dalam Arus Sejarah*.

1817 berhasil menguasai Benteng Duurstede di Saparua. Perlawanan Pattimura yang berlangsung sekitar enam bulan berakhir dengan penangkapan dirinya oleh penjajah Belanda. Pattimura beserta ratusan pejuang lainnya gugur menghadapi pasukan Belanda dibantu sekutu-sekutunya dari Ternate dan Tidore pada November 1817.²⁵⁹

Hampir semua buku sejarah telah mengkaji penyebab perlawanan Pattimura. Tetapi terdapat perbedaan mengenai nama asli Pattimura. Selain itu hanya sedikit yang menjelaskan agama Pattimura. Leirissa menyebutkan bahwa nama Pattimura adalah Thomas Matulesy. Sartono Kartodirjo dalam *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 dari Emporium sampai Imperium* menyebutkan bahwa nama Pattimura adalah Thomas Matulesia.²⁶⁰ Buku *Sejarah Nasional Indonesia* jilid IV mencantumkan bahwa nama Pattimura ialah Thomas Matulesy.²⁶¹ Tiga buku tersebut sama sekali tidak menjelaskan agama Pattimura. Ahmad Mansur Suryanegara mengatakan bahwa Pattimura bernama Ahmad Lussy dan ia adalah seorang Muslim penganut agama Islam. Oleh karena itu, merupakan kesalahan apabila penulisan sejarah menyebut Pattimura sebagai penganut Kristen.²⁶²

Mengenai Si Singamangaraja XII, kebanyakan buku sejarah juga tidak menjelaskan agama Si Singamangaraja XII. Rusdi Sufi mengatakan bahwa jatuhnya daerah Mandailing, Angkola, Padang Lawas, Sipirok, Tapanuli, dan sekitarnya ke tangan penjajah Belanda mengancam daerah kekuasaan raja Batak. Suatu insiden terbunuhnya raja Batak, Tuan na Bolon (Si Singamangaraja X) menjadi peringatan keras bagi rakyat Batak terhadap bahaya imperialisme Belanda. Ancaman Belanda terhadap kedaulatan tanah Batak ditambah lagi oleh masuknya misi agama Kristen yang dimulai sekitar tahun 1843 sehingga agama dan kepercayaan tradisional secara berangsur-angsur beralih ke agama Kristen. Misi Kristenisasi ini menyebabkan proses Islamisasi di pedalaman Batak terhambat, meskipun Batak telah diapit oleh Daerah yang agama Islamnya kuat, yakni Aceh dan Minangkabau.

Setelah Si Singamangaraja XI wafat, kepemimpinan dipegang putrinya, Patuan Bosar Ompu Pulo Batu atau Si Singamangaraja XII. Ia mengetahui bahwa kristenisasi dapat membahayakan Batak

²⁵⁹ R.Z. Leirissa, "Pattimura dari Saparua" dalam *Indonesia dalam Arus Sejarah*, Jilid IV, 405-408.

²⁶⁰ Sartono Kartodirjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 dari Emporium sampai Imperium*, Jilid I (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), 375.

²⁶¹ Marwati Djoned Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto (ed.), *Sejarah Nasional IV* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), 155.

²⁶² Suryanegara, *Api Sejarah*, 200.

dan kedaulatannya secara sosial, politis, maupun ekonomis. Oleh karena itu, pada 1877 ia mengadakan kampanye keliling daerah agar rakyat mengusir kehadiran zending sehingga terjadi pembakaran pos-pos zending dan gereja. Sementara itu, kabar mengenai bantuan pejuang Aceh kepada Si Singamangaraja XII menjadikan Belanda memerintahkan penyerangan Batak pada 8 Januari 1878. Sejak Pebruari 1978 terjadilah Perang Batak yang berlangsung selama 29 tahun hingga tahun 1907. Perang berakhir ketika Si Singamangaraja XII dikalahkan penjajah Belanda. Dengan berbekal beberapa rencong, Si Singamangaraja XII, putra-putranya, dan beberapa pengikutnya gugur sebagai pahlawan pada 17 Juni 1907.²⁶³ Menurut A.M. Djuliaty Suroyo, bantuan pejuang Aceh kepada Si Singamangaraja XII itu dikarenakan Aceh dan Batak sama-sama dirugikan oleh imperialisme Belanda dalam bidang perdagangan. Sejak kemenangan Belanda tersebut, proses penyebaran Kristen semakin berkembang di Batak.²⁶⁴

Sejarah Nasional Indonesia jilid IV juga menjelaskan bahwa Si Singamangaraja XII menentang Belanda yang melakukan zending untuk penyebaran Kristen di tanah Batak. Selama perjuangannya antara 1878-1907, ia dibantu oleh pejuang-pejuang Aceh.²⁶⁵ Penjelasan lebih lengkap mengenai figur Si Singamangaraja XII diberikan oleh Ahmad Mansur Suryanegara. Dengan mengutip Lumbangtobing dalam *Sedjarah Si Singamangaradja*, ia menerangkan bahwa Si Singamangaraja XII yang sangat menentang Belanda beserta zending Kristennya adalah seorang pahlawan yang beragama Islam. Bendera dan lambang-lambang yang dipakainya mengikuti tradisi Rasulullah.

Menurutnya Suryanegara, Perang Batak (1872-1907) berlangsung bersamaan dengan Perang Aceh (1873-1914). Kedua perang ini tidak dapat dilepaskan hubungannya dengan provokasi imperialis kerajaan Protestan Belanda. Provokasi ini sangat dipengaruhi oleh keuntungan sistem tanam paksa Belanda yang sangat besar. Ambisi penyerangan imperialis Belanda didorong pula oleh situasi semakin menguatnya kedudukan kerajaan-kerajaan imperialis Protestan di Eropa, Inggris, dan Amerika. Kondisi lain yang mendorong dipercepatnya penguasaan pulau Sumatera ialah akibat dari semakin lemahnya kekuasaan kesultanan Turki. Kontak niaganya dengan Nusantara

²⁶³Rusdi Sufi, "Perlawanan Si Singamangaraja di Tanah Batak" dalam *Indonesia dalam Arus Sejarah*, Jilid IV, 577-578.

²⁶⁴A.M. Djuliaty Suroyo, "Perkembangan Agama Kristen Protestan" dalam *Indonesia dalam Arus Sejarah*, Jilid IV, 230.

²⁶⁵Poesponegoro, *Sejarah*, Jilid IV, 264.

diputuskan oleh imperialis Belanda dan Inggris. Perang Batak dimulai dengan serbuan zending. Invasi ini mendorong Si Singamangaraja menjalin kontak dengan Aceh dan Sumatera Barat. Ia kemudian dibantu dua panglima (panglima Nali dari Sumatera Barat dan panglima Teuku Muhammad dari Aceh).²⁶⁶

Banyaknya penulis yang tidak menjelaskan agama Islam yang dianut Pattimura dan Si Singamangaraja XII itulah yang mungkin menyebabkan buku *Sejarah Umat Islam Indonesia* yang diterbitkan MUI tidak menyebutkan sedikit pun tentang perjuangan kedua pahlawan itu. Buku itu hanya menguraikan Perang Jawa atau Perang Diponegoro (1825-1830), Perang Paderi (1821-1837), dan Perang Aceh (1873-1904).²⁶⁷ Memang, pahlawan nasional adalah milik seluruh bangsa Indonesia, dan bukan milik segolongan umat saja. Namun, pengungkapan fakta mengenai agamanya sangat penting bagi generasi sekarang dan mendatang. Sebaliknya, membiarkan identitas agamanya mengambang justru semakin membawa masyarakat kepada kebingungan. Kepastian tentang identitas agamanya dapat bermanfaat bagi masyarakat, sebagaimana manfaat yang dipetik masyarakat setelah mengetahui identitas agama Islam yang dianut Laksamana Cheng ho yang berasal dari Tiongkok. Dengan mengetahui jasa Cheng ho dalam menyebarkan Islam di Indonesia, maka hubungan antara Muslim Indonesia dan Muslim Tiongkok menjadi semakin erat.

2. Peranan Budi Utomo dalam kebangkitan nasional

Berkat kegiatan seorang pensiunan dokter Jawa bernama Wahidin Soedirohoesodo dan dukungan dua siswa sekolah STOVIA bernama Raden Soetomo dan Raden Goenawan, maka berdirilah organisasi Boedi Oetomo pada 20 Mei 1908 yang beranggotakan kaum tua dari bangsawan Jawa. Berdirinya Boedi Oetomo seolah menjadi pelita bagi munculnya organisasi-organisasi pemuda lainnya.²⁶⁸ Penjelasan tentang Budi Utomo dijumpai pula dalam *Sejarah Nasional Indonesia* jilid V. Disebutkan bahwa Budi Utomo didirikan pada 20 Mei 1908 atas prakarsa Wahidin Sudirohusodo, pensiunan dokter dan termasuk golongan priyayi rendahan dari Jawa, yang

²⁶⁶Suryanegara, *Api*, 236-240.

²⁶⁷Taufik Abdullah et al., *Sejarah Umat Islam Indonesia* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1991), 141-181.

²⁶⁸Restu Gunawan, "Pemuda dan Perempuan dalam Dinamika Nasionalisme Indonesia" dalam *Indonesia dalam Arus Sejarah*, Jilid V, 353.

awalnya ingin membentuk “Dana Pelajar”. Budi Utomo yang diketuai Sutomo dalam perkembangannya banyak beranggotakan para priyayi rendahan dari kalangan tua yang moderat dan lebih mengutamakan jabatannya. Lambat laun Budi Utomo justru tidak dapat berkembang dan pengaruhnya terhadap masyarakat tidak besar.²⁶⁹

Tetapi sebagian orang mempertanyakan pemilihan terhadap Budi Utomo itu karena Budi Utomo ditegakkan atas nasionalisme Jawa, banyak beranggotakan para bupati yang merupakan tangan kanan pemerintah Belanda, dan menolak cita-cita persatuan Indonesia. Pada dasarnya Budi Utomo adalah organisasi yang didukung Belanda untuk mengimbangi gerakan kebangkitan pendidikan Islam yang dipelopori Jamiat Khair pada 17 Juli 1905.²⁷⁰ Organisasi nasionalis yang lebih tepat untuk dijadikan pijakan hari kebangkitan nasional adalah Syarikat Islam yang berawal dari Syarikat Dagang Islam. Pendiri SDI, H. Samanhudi menuturkan kepada H. Tamar Djaja pada 25 Juni 1955 yang dibenarkan oleh Mohammad Roem bahwa SDI berdiri pada 16 Oktober 1905 dan SI berdiri pada 1906. Pendirian SI biasanya dituliskan pada 10 September 1912 ketika SI mendapat penetapan hukum di hadapan notaris B. Ter Kuile di Surakarta.²⁷¹ SI yang dipimpin HOS Cokroaminoto merupakan gerakan politik pertama yang menuntut pemerintahan sendiri (*zelfbestuur* atau *self government*) kepada Belanda pada 1916 mendahului Petisi Soetardjo pada 5 Oktober 1937.²⁷²

Mengenai SDI ternyata buku *Indonesia dalam Arus Sejarah* memberikan penjelasan agak berbeda dari Suryanegara. Menurut Muhammad Hisyam, pada 1909 Tirtoadisuryo, lulusan dari OSVIA (sekolah pamongpraja) mendirikan Sarekat Dagang Islamiyah di Batavia. Setahun kemudian Haji Samanhudi mendirikan Sarekat Dagang Islam (SDI) di Surakarta. SDI cabang Surabaya didirikan oleh H.O.S. Tjokroaminoto pada tahun yang sama. Dalam kongres pertama SDI di Solo tahun 1912 SDI diubah menjadi Sarekat Islam (SI) dengan Tjokroaminoto sebagai ketuanya. SI berkembang sangat pesat yang disebabkan antara lain oleh faktor agama Islam yang telah menjadi simbol kebangsaan melawan kolonialisme. Sejak itu, SI menjadi organisasi orang pribumi pertama di Indonesia yang tidak hanya menarik anggota dari Jawa, tetapi juga dari berbagai daerah dan pulau

²⁶⁹ Poesponegoro, *Sejarah*, Jilid V, 177-180.

²⁷⁰ Suryanegara, *Api*, 337-344.

²⁷¹ *Ibid.*, 361 dan 373.

²⁷² *Ibid.*, 536.

sehingga ia telah berskala nasional. Apalagi dipertegas dengan kesuksesan Kongres Nasional I Central Sarekat Islam (De Eerste National Central Sarekat Islam) di Bandung pada 1916.²⁷³ Jelaslah bahwa gagasan tentang nasionalisme universal dikemukakan pertama kali oleh Kongres Sarekat Dagang Islam di Surabaya pada 1911 dan dipertegas lagi pada kongres di Bandung 1916.²⁷⁴

Informasi yang justru menjadikan jati diri SDI bertambah samar adalah kerancuan dalam penyebutan SDI, yaitu antara SDI yang dibentuk R.M. Tirtoadisoerjo dan Haji Samanhudi.²⁷⁵ Sebagai buku rujukan sejarah paling terbaru, semestinya hal semacam ini dapat dihindari dengan mengedepankan sinkronisasi informasi sehingga para pembaca tidak kebingungan.

3. Peranan Syafruddin Prawiranegara dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia

Berbeda dengan buku *Sejarah Nasional Indonesia* jilid VI yang hanya mengkaji sekilas tentang peranan Syafruddin Prawiranegara dengan PDRI dan tidak menyebutnya sebagai presiden RI,²⁷⁶ buku *Indonesia dalam Arus Sejarah* memberikan porsi lebih banyak dalam menguraikan persolan ini. Menurut Mestika Zed, pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda secara tiba-tiba menyerang Yogyakarta dan menangkap para pemimpin puncak Republik Indonesia. Pemerintah kemudian mengirim surat kawat kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara (menteri kemakmuran saat itu) yang berisikan penyerahan mandat dari presiden dan wakil presiden kepada Syafruddin Prawiranegara untuk memimpin suatu pemerintahan darurat di Sumatera. Menyadari dirinya sebagai satu-satunya menteri kabinet Hatta di Sumatera, maka ia berinisiatif membentuk PDRI di Bukittinggi, Sumatera Barat, demi kesinambungan kepemimpinan RI, sekalipun surat kawat berisi mandat Soekarno tidak pernah sampai ke tangannya karena hubungan dengan Yogya sudah dicegat Belanda. Sesuai dengan sifatnya, darurat, PDRI menjalankan pemerintahan secara berpindah-pindah dari satu

²⁷³ Muhammad Hisyam, "Reformasi Islam dan Kebangkitan Kebangsaan", dalam *Indonesia dalam Arus Sejarah*, Jilid V (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2012), 344-347.

²⁷⁴ Namun Boedi Oetomo ternyata dipandang sebagai pelopor gerakan nasional. Demikian ditegaskan Soegijanto Padmo, "Perkembangan Sosial Ekonomi Pribumi", dalam *Indonesia dalam Arus Sejarah*, Jilid V (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2012), 228.

²⁷⁵ Taufik Abdullah, "Dari Hasrat 'Kemajuan' ke Pembentukan Bangsa", dalam *Indonesia dalam Arus Sejarah*, Jilid V (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2012), 68.

²⁷⁶ Poesponegoro, *Sejarah*, Jilid VI, 161 dan 169.

tempat ke tempat lain di hutan sambil meneruskan perang gerilya ketika para pimpinan pemerintah di Yogyakarta menyerahkan diri kepada Belanda dan selanjutnya ditawan di Bangka. Perjuangan gerilya juga dilakukan oleh Panglima Besar Jenderal Soedirman. Walaupun dalam keadaan sakit parah yang menyebabkan dirinya digotong di tandu, ia bersama pasukannya terus bergerilya di hutan-hutan pedalaman Jawa sejak 19 Desember 1948.

Pada 23 Maret 1949 Komisi PBB mulai membicarakan pengembalian pemimpin dan pemerintah RI ke Yogyakarta lewat perundingan Roem-Royen. Tetapi sebenarnya perundingan itu tidak disetujui oleh Syafruddin dan Soedirman karena para pemimpin di Bangka seakan-akan meninggalkan mereka yang menyabung nyawa dalam perjuangan gerilya.²⁷⁷ Setelah pemulihan Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan pada awal Juli 1949, para pemimpin PDRI mendarat di lapangan terbang Maguwo, Yogyakarta, pada 10 Juli 1949 dan disambut oleh Moh. Hatta, Sultan HB IX, dan pejabat RI lainnya. Demikian pula, para hari yang sama Soedirman bersama pasukannya juga memasuki Yogyakarta.²⁷⁸

Meskipun telah membahas lebih mendetail tentang PDRI, namun *Indonesia dalam Arus Sejarah* menyebutkan nama depan tokoh PDRI itu secara tidak sama, yaitu Sjarifuddin Prawiranegara²⁷⁹ dan Syafruddin Prawiranegara.²⁸⁰ Selain perbedaan penyebutan nama, *Indonesia dalam Arus Sejarah* juga tidak tegas menjelaskan statusnya karena disebutkan bahwa kedudukannya sebagai Presiden/Ketua PDRI.²⁸¹ Menurut Bambang Purwanto, hampir semua warga Indonesia meyakini bahwa Soeharto adalah presiden kedua setelah Soekarno. Tetapi, sebenarnya masih ada dua nama yang belum tercakup, yakni Syafruddin Prawiranegara dan Assaat yang seharusnya dapat dikategorikan sebagai presiden dalam sejarah Indonesia, jika sejarah dilihat sebagai proses. Syafruddin Prawiranegara menjabat sebagai pemimpin Pemerintah Darurat Republik Indonesia (19

²⁷⁷ Mestika Zed, "Pemerintah Darurat Republik Indonesia" dalam *Indonesia dalam Arus Sejarah*, Jilid VI, 413-451.

²⁷⁸ R.Z. Leirissa, "Roem-Royen" menuju Yogya kembali", dalam *Indonesia dalam Arus Sejarah*, Jilid VI, 510-511.

²⁷⁹ *Ibid.*, Jilid VI, 153, Jilid IX, 14 dan 101.

²⁸⁰ *Ibid.*, Jilid VI, 167 dan Jilid VII, 138.

²⁸¹ *Ibid.*, Jilid IX, 14.

Desember 1948 – 13 Juli 1949), sedangkan Assaat sebagai kepala negara ketika RI menjadi bagian Republik Indonesia Serikat 1949.²⁸²

4. Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G-30-S / PKI

Peristiwa usaha kudeta Gerakan 30 September (G-30-S) tahun 1965 telah diteliti dan dikaji oleh pelbagai pihak yang kemudian menghasilkan beberapa teori. Di antaranya adalah teori G-30-S sebagai persoalan internal Angkatan Darat, teori CIA sebagai dalang G-30-S, teori G-30-S sebagai pertemuan antara kepentingan Inggris dan Amerika Serikat, teori Soekarno sebagai dalang G-30-S, teori chaos, dan teori pimpinan PKI sebagai dalang G-30-S. Dari beberapa teori tersebut, tampaknya data-data mengenai keterlibatan PKI dalam G-30-S sangat banyak sehingga penjelasan tentang ofensif revolusioner PKI hingga upaya kudeta mereka diuraikan lebih lengkap.²⁸³

Dalam buku jilid VIII disebutkan bahwa kegagalan kudeta Gerakan 30 September (G-30-S) 1965 membuat situasi politik nasional berubah drastis dan berkembang tanpa arah. Berbagai kepentingan mulai saling berbenturan. Konflik terpolarisasi antara friksi Soekarno dan Angkatan Darat yang diwakili oleh Soeharto. Bagaikan bola salju, konflik ini menjadi semakin besar hingga puncaknya adalah saat Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) 1966 mengukuhkan kekuatan politik Soeharto dan melemahkan posisi Soekarno. Menurut Oei Tjoe Tat, sejak gagalnya G-30-S, kepemimpinan Soekarno sudah berakhir. Kekuasaan secara *de facto* telah terlepas dari tangan Soekarno.

TNI AD melakukan ofensif politik terorganisasi dan dengan gencar melakukan kampanye untuk melunturkan kekuasaan Soekarno. Selain itu, aksi-aksi mahasiswa dan pelajar di kota-kota besar seluruh Indonesia menuntut pembubaran PKI (Partai Komunis Indonesia). Dalam pandangan Soeharto, PKI telah melakukan tindakan *coup*. Jika PKI tidak ditindak, PKI akan mengulangi perbuatannya. Keterlibatan PKI sebagai dalang G-30-S tidak dapat dibantah.²⁸⁴ Setelah kedudukan

²⁸² Purwanto, *Menggugat*, 6-8 dan 113-117.

²⁸³ Aminuddin Kasdi, “Kudeta Gerakan 30 September (G-30-S)”, dalam *Indonesia dalam Arus Sejarah*, Jilid VII (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2012), 487-526.

²⁸⁴ Saleh As’ad Djamhari, “Lahirnya Orde Baru” dalam *Indonesia dalam Arus Sejarah*, Jilid VIII, 3-7.

Soeharto semakin kokoh, maka sejak itulah era baru muncul. Jadi, pemerintahan Orde Baru lahir akibat krisis politik yang ditimbulkan Gerakan 30 September 1965 yang dipimpin oleh Untung Syamsuri, pengikut PKI dalam tubuh Angkatan Darat. Oleh sebab itu, Soeharto langsung membubarkan PKI beserta ormas-ormas afiliasinya pada 12 Maret 1966 setelah menerima Supersemar. Sesuai namanya, Orde Baru yang anti komunis menghadirkan semangat baru yang berbeda dengan Orde Lama.²⁸⁵ Pemerintahan Orde Baru berakhir ketika Indonesia diterpa krisis moneter. Pada bulan Januari 1998, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp. 17.000 per US Dollar. Indonesia memasuki babak suram di bidang perekonomian. Beberapa perusahaan bangkrut, PHK terjadi besar-besaran, dan hutang Indonesia menjadi sangat besar. Krisis ekonomi itu diikuti krisis politik. Sidang Umum MPR tanggal 1-11 Maret 1998 menetapkan kembali Soeharto sebagai presiden RI, namun perkembangan politik semakin memanas. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto menyatakan berhenti sebagai presiden. B.J. Habibie kemudian menjadi presiden berikutnya.²⁸⁶ Walaupun Habibie disebut oleh Kevin O'rourke sebagai *president by accident* (presiden secara kebetulan), tetapi ia telah banyak melakukan perubahan kebijakan fundamental, antara lain ialah izin pembentukan partai politik, undang-undang otonomi daerah, dan undang-undang kebebasan pers. Hal yang mengejutkan adalah keputusannya untuk memberikan referendum Timor Timur pada bulan Januari 1999 sehingga Timor Timur (yang dengan susah payah telah diintegrasikan oleh ABRI) akhirnya keluar dari NKRI pada referendum 30 Agustus 1999. Sejak bergulirnya era reformasi (mulai dari B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnowati, hingga Susilo Bambang Yudhoyono), ternyata masih banyak agenda reformasi yang belum teratasi dan harus dihadapi bangsa Indonesia.²⁸⁷

²⁸⁵ Abdul Syukur, "Hubungan Masyarakat dan Negara" dalam *Indonesia dalam Arus Sejarah*, jilid 8, 55-57. Uraian memadai yang menegaskan PKI sebagai dalang G-30-S 1965 dipaparkan oleh I. Ketut Ardhana yang mengutip berbagai pendapat tentang tragedi berdarah tersebut. Lihat I. Ketut Ardhana, "Konflik Lokal setelah Kudeta yang Gagal" dalam *Indonesia dalam Arus Sejarah*, Jilid VIII, 605-615.

²⁸⁶ Genoveva Ambar Wulan Tulistyowati, "Dinamika Reformasi ABRI" dalam *Indonesia dalam Arus Sejarah*, Jilid VIII, 617-636.

²⁸⁷ Susanto Zuhdi, "Epilog: Masa Awal Reformasi" dalam *Indonesia dalam Arus Sejarah*, Jilid VIII, 655-666.

Setelah melakukan pembacaan sekilas terhadap buku *Indonesia dalam Arus Sejarah* dan melaksanakan penelaahan mendalam terhadap beberapa tema yang terdapat dalam buku sejarah nasional Indonesia tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa secara umum para penulis yang menjadi kontributor dalam penyusunan buku itu telah memenuhi metode penulisan sejarah. Namun terdapat sesuatu yang kurang dalam historiografi tersebut, yakni sebagian penulis masih menggunakan sumber sekunder dalam tulisannya, padahal sebaiknya sumber primer diutamakan daripada sumber sekunder.²⁸⁸ Hal inilah yang sejak awal juga diakui sendiri oleh Leirissa yang mengatakan bahwa pembahasan yang disajikan tidak didasarkan pada penelitian sumber-sumber sejarah primer. Untuk melakukan penelitian mendasar seperti itu dibutuhkan waktu dan fasilitas yang jauh lebih banyak yang tidak tersedia bagi penulisan buku sejarah Indonesia yang komprehensif seperti ini sehingga dapat dimengerti kalau tulisan-tulisan ini semata-mata bergantung pada sumber sekunder berupa buku-buku dan artikel-artikel ilmiah yang dihasilkan oleh para pakar Indonesia maupun asing.²⁸⁹

Adapun terkait dengan penilaian terhadap obyektivitas penulisan sejarah dalam *Indonesia dalam Arus Sejarah*, maka relatif agak sulit melakukan penilaian secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan buku yang terdiri dari delapan jilid utama merupakan kumpulan berbagai tulisan dari sekian banyak penulis yang masing-masing tentunya bertanggung jawab atas kebenaran tulisannya sendiri-sendiri secara individual. Tetapi harus diakui bahwa dalam beberapa tulisan yang dibaca lebih mendalam dijumpai beberapa persoalan kesejarahan yang seharusnya dapat dihindari apabila ada penelaahan ulang terhadap tema-tema tersebut. Di antara persoalan-persoalan tersebut adalah menyangkut peranan Pattimura dan Si Singamangaraja XII dalam melawan penjajahan, peranan Budi Utomo dalam kebangkitan nasional, peranan Syafruddin Prawiranegara dan Assaat dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dan peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G-30-S / PKI, sebagaimana telah dijelaskan di atas.

²⁸⁸Data biasanya dibedakan menjadi primer dan sekunder. Data primer adalah data yang disampaikan oleh saksi mata, sedangkan data sekunder adalah data yang disampaikan oleh sumber yang bukan saksi mata. Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Benteng, 1997), 96 dan Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1985), 43.

²⁸⁹Lihat pengantar Leirissa dalam *Indonesia dalam Arus Sejarah*, Jilid VII, 2.

Terlepas dari itu semua, penulisan *Indonesia dalam Arus Sejarah* harus mendapatkan apresiasi karena para penulisnya telah memasukkan tema-tema atau pembahasan yang sebelumnya tidak dijumpai dalam buku *Sejarah Nasional Indonesia* sehingga pembahasan-pembahasan yang juga penting dalam perjalanan bangsa Indonesia (tapi kurang diperhatikan) dan peristiwa-peristiwa yang bersifat lokal dapat ditampilkan dalam historiografi Indonesia. Tidak hanya itu, para penulis buku sejarah nasional terbaru tersebut telah memaparkan penjelasan sejarah 'apa adanya' bukan 'sebagaimana dikehendaki penguasa'. Selain menyampaikan pujian atas prestasi pemerintah yang berkuasa, ternyata mereka berani pula menyatakan persoalan-persoalan masyarakat Indonesia yang belum teratasi secara tuntas. Misalnya adalah yang dilakukan Susanto Zuhdi.²⁹⁰

Penutup

Berdasarkan kajian yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat dinyatakan sebagai berikut. Perkembangan historiografi Indonesia diawali dari penulisan bercorak tradisional dan selanjutnya meningkat menjadi penulisan sejarah bercorak modern. Perkembangan signifikan historiografi nasional ditandai oleh pengungkapan "sejarah dari dalam" dengan menempatkan bangsa Indonesia sebagai pemegang peranan pokok. Ikhtiar bangsa Indonesia kemudian menghasilkan buku *Sejarah Nasional Indonesia* yang terdiri dari enam jilid. Bangsa Indonesia selanjutnya mempunyai buku sejarah nasional terbaru, yakni *Indonesia dalam Arus Sejarah*, yang terdiri dari 9 jilid.

Secara umum, para penulis yang menjadi kontributor dalam penyusunan buku *Indonesia dalam Arus Sejarah* telah memenuhi metode penulisan sejarah. Namun terdapat sesuatu yang kurang dalam historiografi tersebut, yakni sebagian penulis masih menggunakan sumber sekunder dalam tulisannya, padahal sebaiknya sumber primer diutamakan daripada sumber sekunder. Adapun terkait dengan penilaian terhadap obyektivitas penulisan sejarah dalam *Indonesia dalam Arus Sejarah*, maka relatif agak sulit melakukan penilaian secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan buku yang terdiri dari delapan jilid utama merupakan kumpulan berbagai tulisan dari sekian banyak penulis yang masing-masing tentunya bertanggung jawab atas kebenaran tulisannya sendiri-sendiri

²⁹⁰Susanto Zuhdi, "Epilog: Masa Awal Reformasi" dalam *Indonesia dalam Arus Sejarah*, Jilid VIII, 666.

secara individual. Tetapi harus diakui bahwa dalam beberapa tulisan yang dibaca lebih mendalam dijumpai beberapa persoalan kesejarahan yang seharusnya dapat dihindari apabila ada penelaahan ulang. Di antara persoalan-persoalan tersebut adalah menyangkut peranan Pattimura dan Si Singamangaraja XII dalam melawan penjajahan, peranan Budi Utomo dalam kebangkitan nasional, peranan Syafruddin Prawiranegara dan Assaat dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, serta peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G-30-S / PKI.

Meskipun Indonesia telah berhasil menyusun historiografi nasional, ternyata permasalahan-permasalahan historiografis masih belum dituntaskan oleh para sejarawan Indonesia. Di antara langkah nyata yang dapat dilakukan ialah mendorong masyarakat sejarawan Indonesia untuk membuat rekomendasi kepada pemerintah agar mengadakan perubahan kebijakan yang dipandang memiliki pijakan lemah secara historis. Dengan terus menerus menggalang gerakan pelurusan sejarah, diharapkan pemahaman keliru sebagian besar bangsa Indonesia mengenai sejarahnya dapat diperbaiki.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik (et al.). *Ilmu Sejarah dan Historiografi: Arab dan Perspektif*. Jakarta: Gramedia, 1985.
- _____. *Sejarah Umat Islam Indonesia*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1991.
- Abdullah, Taufik dan A.B. Lopian (ed.). *Indonesia dalam Arus Sejarah*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2012.
- Gottschalk, Louis. *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1985.
- Kartodirjo, Sartono. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 dari Emporium sampai Imperium*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Kuhn, Thomas Samuel. *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago: The University of Chicago Press, 1970.
- Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang, 1997.
- Mulyana, Agus dan Darmiasti, *Historiografi di Indonesia dari Magis-Religius hingga Strukturis*. Bandung: Refika Aditama, 2009

Poesponegoro, Marwati Djoned dan Nugroho Notosusanto (ed.). *Sejarah Nasional*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.

Purwanto, Bambang dan Asvi Warman Adam. *Menggugat Historiografi Indonesia*. Yogyakarta: Ombak, 2005.

Soedjatmoko (ed.). *Historiografi Indonesia: Sebuah Pengantar*, terj. Mien Djubhar. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995.

Suryanegara, Ahmad Mansur. *Api Sejarah*. Bandung: Salamadani, 2009.